

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 DI DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Merina Afrilia¹
Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si²
Hj Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si³

Abstrak

Merina Afrilia, Program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Temgarong Seberang. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I, dan Ibu Hj. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II.

Pada pemilihan yang diadakan secara langsung di Indonesia golput marak mewarnai penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah, sedangkan untuk Desa Manunggal Jaya golput yang terjadi adalah sebesar 37,13% atau 1.958 suara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat di Desa Manunggal Jaya pada Pilkada Bupati Tahun 2015. Pada penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui partisipasi pada bentuk konvensional. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan golput.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Temgarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2009).

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: merinaafrilia95@gmail.com

² Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat pada bentuk konvensional masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberian suara/voting hanya sebesar 63,86%. Diskusi politik yang dilakukan masyarakat juga tidak bersifat formal dan dalam intensitas yang tidak rutin dilakukan. Dalam hal kegiatan kampanye tingkat keikutsertaan masyarakat juga rendah, hal ini dipengaruhi oleh tidak kompetitifnya pasangan calon dimana untuk Desa Manunggal Jaya hanya calon yang berasal dari jalur independen yang merupakan Incumbent yang melakukan kegiatan kampanye. Partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam kelompok kepentingan (tim sukses) juga terbilang rendah hal ini karena faktor rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat merasa tidak mampu untuk bergabung dalam tim sukses, selain itu masyarakat yang memiliki keluarga PNS menyebabkan masyarakat lebih memilih mengambil sikap netral. Komunikasi individual dengan pejabat politik dilakukan masyarakat pada saat debat kandidat calon, namun sebagian besar masyarakat tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan pejabat politik hal ini karena pasangan calon (pejabat politik) tidak pernah terjun ke masyarakat secara langsung. Sedangkan faktor penyebab golput (tidak menggunakan hak pilih) antara lain disebabkan oleh Faktor rasionalitas (pekerjaan), faktor administrasi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial ekonomi, dan faktor karakteristik kepribadian dan pengalaman sosial politik .

Kata Kunci: *Pilkada, Partisipasi Politik, Golongan Putih.*

Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu proses terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan semangat persamaan, persatuan, dan kebersamaan dilakukan oleh masyarakat. Keputusan dan pilihan masyarakat dalam menentukan pilihan bertujuan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. Hadirnya Pemilukada sebagai hak masyarakat dalam menentukan pilihan, kemudian ditanggapi oleh pemerintah melalui kebijakan. Kebijakan perpolitikan di Indonesia telah menjamin adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan demokrasi pada tingkat lokal yang disebut Pemilukada.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan dan salah satu tempat penelitian adalah Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki luas wilayah mencapai 437 km² dengan jumlah penduduk mencapai 79.997 jiwa (April 2014) yang tersebar di 18 desa. Secara administratif, pusat pemerintahan Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Manunggal Jaya.

Jumlah Pemilih di Desa Manunggal Jaya adalah 5.273 pemilih terdiri dari 2750 pemilih laki-laki dan 2.523 pemilih perempuan. Dari total jumlah pemilih, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 3.315, Jika diubah dalam presentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah 62.8 % dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) sebesar 37.2 % atau sebanyak 1.958 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (Golput). Desa Manunggal Jaya yang merupakan pusat daerah administratif kecamatan Tenggarong Seberang merupakan wilayah yang memiliki angka golput lebih tinggi dari 16 desa lainnya. Sehingga hal ini menjadi fenomena politik yang menarik untuk diteliti.

Dua, timbulnya “pesimisme publik” mereka yang memiliki pandangan pesimis berasumsi bahwa ada atau tidak ada pemilukada, persoalan-persoalan yang ada sudah terlanjur menjadi kompleks, artinya faktor Bupati dan wakil Bupati baru tidak lantas mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. Asumsi yang kuat muncul terhadap “tidak signifikannya” faktor Bupati akan menjamin berlangsungnya perubahan. Akibatnya melahirkan sikap apatis untuk berpartisipasi aktif. Tiga, kekecewaan terhadap perilaku parpol yang sering menunjukkan tidak selaras antara harapan publik dengan realitas kebijakan parpol. Empat, publik semakin kritis terhadap biaya besar Pemilukada Asumsi masyarakat, siapa pun yang terpilih kelak hanya akan memikirkan bagaimana mengembalikan kapital politik yang telah dikeluarkan selama pemilihan.

Berdasarkan berbagai fenomena di atas, terdapat keprihatinan terhadap rendahnya partisipasi politik masyarakat terutama di Desa Manunggal Jaya. Oleh karena itu, Dalam skripsi ini peneliti ingin mengkaji sejauh mana perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi di Desa Manunggal Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada yang telah dilakukan secara konvensional, serta alasan apa yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengambil sikap apatis (golput).

Rumusan masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang?
2. Mengapa timbul sikap apatis (Golput) pada sebagian masyarakat Desa Manunggal Jaya dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Kecamatan Tenggarong Seberang?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.

2. Untuk mengetahui alasan timbulnya sikap apatis (Golput) pada sebagian masyarakat Desa Manunggal Jaya dalam Pemilihan Bupati Kutai kartanegara Tahun 2015 Kecamatan Tenggarong Seberang.

Manfaat Penelitian

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti fenomena politik yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti.
- 2) Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah khazanah keustakaan politik.
- 3) Sebagai rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian partisipasi politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno,2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat

pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith Fauls

Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*

Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Digunakannya teori partisipasi politik dalam proposal penelitian ini adalah Karena, tingkat partisipasi politik adalah faktor yang menentukan apakah pemilu atau pun pemilukada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka tingkat keberhasilan pemilu ataupun pemilukada semakin tinggi.

Dalam Analisa Modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Menurut Miriam Budiardjo (2008: 367) Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul

kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik.

Menurut Herbert McClosky (dalam Miriam Budiarjo 367: 2008) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Bentuk Partisipasi Politik

Paige dalam Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood (2011:57-58) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

- 1) Partisipasi politik konvensional
 - a) Pemberian suara atau voting
 - b) Diskusi politik
 - c) Kegiatan kampanye
 - d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- 2) Partisipasi politik nonkonvensional
 - a) Pengajuan petisi
 - b) Berdemonstrasi
 - c) Konfrontasi
 - d) Mogok
 - e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran.
 - f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia : penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Di era orde baru sebelum bergulirnya reformasi dalam UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tetapi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya di daerah, pilkada juga merupakan sarana untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seperti halnya negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang mengalami perubahan signifikan pasca runtuhnya orde baru.

Kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik, rakyat dapat dengan bebas menyalurkan pendapatnya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang pada masa orde baru sangat dibatasi. Kelahiran pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia.

Tip O’Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa ‘*all Politics is local*’ yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk (Leo Agustino, 2009: 17). Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan pilkada secara langsung, asumsinya ; sebagai upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di ranah lokal).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Adapun yang menjadi

fokus dalam penelitian yaitu :

- 1) Partisipasi politik konvensional
 1. Pemberian suara atau voting
 2. Diskusi politik
 3. Kegiatan kampanye
 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput).

Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.
2. Data Sekunder
Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
 1. Dokumen
 2. Buku-buku ilmiah dan internet

Adapun yang menjadi *key* informan penelitian ini adalah:

1. Bapak Ari Nubiyanto SP selaku Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tenggarong Seberang
2. Bapak Hermanto selaku Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Manunggal Jaya

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang menggunakan hak pilih dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian lapangan
 - a) Observasi
 - Pengamatan langsung.
 - Mencatat perilaku dan kejadian sebagai mana yang sebenarnya.
 - b) Wawancara
 - c) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif. Dalam model analisa ini terdapat tiga komponen analisa, yaitu : reduksi

data, salinan data, dan penarikan kesimpulan Miles dan Huberman, (dalam Satori, 2014), yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Hasil Penelitian

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya KecamatanTenggarong Seberang.

1. Partisipasi Politik Konvensional

a. Pemberian Suara/Voting

Beberapa masyarakat di Desa Manunggal Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara menyadari pentingnya menggunakan hak pilih sebagai salah satu wujud hak politik dan kewajiban sebagai warga negara yang harus diberikannya dalam pemilihan umum sehingga memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan suara pada saat pencoblosan di TPS.

Sebagian masyarakat memilih pemimpin di daerahnya juga dilandasi dengan figur pasangan calon, latar belakang pendidikan, popularitas pasangan calon dan program-program pembangunan yang sudah dijalankan maupun yang baru akan ditawarkan. Masyarakat memiliki kriteria yang logis dalam memilih pasangan calon sehingga menjadi pertimbangan untuk menentukan kepada siapa pilihan akan dijatuhkan.

b. Diskusi Politik

Diskusi politik juga menjadi hal yang dianggap penting oleh masyarakat pada saat sebelum hari pemilihan Bupati, melalui diskusi politik masyarakat dapat saling mengemukakan pendapatnya terkait isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Diskusi politik yang seringkali dilakukan masyarakat tidak bersifat formal dan dengan intensitas yang tidak rutin dilakukan mereka seringkali melakukan diskusi politik dengan obrolan santai yang dilakukan di tempat-tempat yang ramai.

“Agent” dari diskusi politik, seperti orang tua, saudara kandung, teman bermain (peer group), lembaga pendidikan, tempat bekerja dan sebagainya. Hal itu memainkan peranan vital dalam membentuk sikap dan orientasi politik seseorang. Melalui proses diskusi kemudian berkembanglah ikatan psikologis yang kuat antara seseorang individu terhadap isu-isu politik.

Mengenai hal apa yang diperbincangkan, sebagian responden mengaku membicarakan tentang karakter Cabup dan Wabup, program kerja mereka, serta kelayakannya untuk memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Kegiatan Kampanye

Tidak ada kandidat lain selain *Incumbent* yang melakukan kegiatan kampanye menyebabkan masyarakat apatis untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye. Bahkan paslon yang didukung oleh partai politik tidak memanfaatkan

kegiatan kampanye sebagai peluang untuk meraup suara pemilih. Padahal Kegiatan Kampanye seharusnya memainkan peranan vital dalam membentuk sikap dan orientasi politik seseorang, karena melalui kegiatan kampanye berupa sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik akan timbul ikatan psikologis yang kuat antara seorang individu dengan salah satu organisasi massa dan parpol, yang berwujud simpati terhadap parpol. Ikatan psikologis inilah yang kemudian dikenal sebagai “Identifikasi kepartaian” (*party identification*) Identifikasi kepartaian merupakan suatu “perasaan seorang individu kepada parpol” (*The American Voters*, 1960 : 121 dalam Affan Gaffar, 1992).

Status sebagai PNS sehingga harus bersifat netral dan tidak ikut dalam kegiatan kampanye (memobilisasi pemilih), Hal ini termaktub dalam pasal 70 UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang tersebut diatur ketentuan : Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

d. Membentuk dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan

Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan merupakan bagian dari partisipasi politik konvensional. Dalam hal ini, kelompok kepentingan yang dimaksud adalah bergabung dalam tim sukses salah satu pasangan calon. Sebagian masyarakat tidak ikut bergabung dalam kelompok kepentingan karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dalam tim sukses didasari atas rendahnya ekonomi dan tingkat pendidikan. Sebagian kecil masyarakat bergabung dengan tim sukses pasangan calon dan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memilih pasangan calon yang diusungnya. masyarakat yang keluarganya berstatus sebagai PNS berhenti sebagai tim sukses paslon, hal ini karena profesi PNS yang harus netral, pada Undang-Undang Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara. Larangan dan sanksi tersebut juga tertera dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa “Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

e. Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik

Komunikasi individual dengan pejabat politik dilakukan masyarakat dalam debat kandidat pasangan calon, melalui komunikasi masyarakat menyampaikan aspirasi, tuntutan, dan kepentingan yang diinginkan. Namun sebagian besar masyarakat tidak pernah berkomunikasi individual dengan pejabat politik hal ini karena kurangnya pejabat politik yang terjun langsung ke masyarakat, sehingga menutup peluang masyarakat untuk berkomunikasi individual dengan pejabat politik.

Kesimpulan

1. Pemberian suara atau *voting* di Desa Manunggal Jaya dalam Pilkada Bupati 2015, sebagian besar masyarakat di Desa Manunggal Jaya (63,86%) melakukan pemberian suara/*voting* dalam Pilkada Bupati. Kewajiban sebagai warga negara dan kesadaran memiliki hak politik menjadi latar belakang masyarakat untuk memberikan suaranya dalam pilkada. Masyarakat menentukan pilihannya didasari oleh faktor-faktor seperti popularitas, pendidikan, dan kinerja pasangan calon menjadi pertimbangan logis masyarakat dalam pemilihan umum.
2. Diskusi Politik di Desa Manunggal Jaya dalam Pilkada Bupati 2015, Bentuk diskusi yang dilakukan masyarakat tidak bersifat formal, diskusi dilakukan di tempat tinggal dan tempat kerja dengan keluarga dan teman kerja dan Intensitasnya juga tidak rutin dilakukan. Adapun Topik diskusi yang diperbincangkan masyarakat yaitu kandidat yang mencalonkan diri, latar belakang pendidikan, kiprah paslon di dunia politik, partai pengusung, latar belakang kinerja, visi dan misi, paslon yang didukung, serta yang berkaitan dengan hal teknis di lapangan.
3. Kegiatan kampanye di Desa Manunggal dalam Pilkada Bupati 2015, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam kegiatan kampanye. Hal ini dipengaruhi oleh tidak kompetitifnya pasangan calon yang ikut dalam pilkada, kegiatan kampanye hanya dilakukan oleh paslon yang menempuh jalur independen. Pasangan calon yang diusung oleh partai politik justru tidak melakukan kampanye di Desa Manunggal Jaya. Kurangnya informasi jadwal kegiatan kampanye juga disadari masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan rutinitasnya. Selain itu, Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara membuat sebagian masyarakat tidak ikut dalam kegiatan kampanye hal ini karena landasan yuridis yang memang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Adapula Masyarakat yang ikut dalam kegiatan kampanye lebih memilih kegiatan kampanye yang sifatnya dialogis di Aula Desa.
4. Bergabung dalam kelompok kepentingan di Desa Manunggal Jaya dalam Pilkada Bupati 2015, dalam hal ini adalah bergabung sebagai tim sukses. Keterlibatan masyarakat untuk bergabung dalam tim sukses masih kurang, masyarakat menarik diri dari proses politik hal ini dipengaruhi faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga masyarakat merasa tidak mampu untuk menjadi tim sukses. Ada masyarakat yang pernah menjadi bagian dari tim sukses tapi mengundurkan diri karena profesi keluarganya sebagai PNS. Sementara masyarakat yang bergabung menjadi tim sukses melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan berusaha untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik di Desa Manunggal Jaya dalam Pilkada Bupati 2015, masyarakat berkomunikasi dengan pejabat politik pada saat acara Debat kandidat Pasangan calon, dengan

memberikan pertanyaan kepada paslon yang ikut dalam pilkada. Sebagian besar masyarakat tidak pernah melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik, hal ini karena kurangnya paslon yang terjun ke masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah bertemu dengan pejabat politik hanya berkomunikasi dengan tim sukses hal itu menyebabkan masyarakat tidak memiliki peluang untuk berkomunikasi secara langsung.

6. Faktor – faktor yang menyebabkan golput di Desa Manunggal Jaya dalam Pilkada Bupati 2015 yaitu pertama, Faktor rasionalitas salah satu faktor dimana masyarakat lebih mendahulukan urusan pekerjaan daripada menggunakan hak politiknya karena terkendala izin perusahaan. Kedua, faktor administrasi seperti tidak akuratnya data pemilih dan tidak terdaftarnya masyarakat sebagai pemilih karena surat pindah yang belum diselesaikan. Faktor ketiga, sebagian masyarakat yang sedang pendidikan diluar daerah juga menjadi faktor golput. Keempat, Faktor sosial ekonomi karena pendidikan yang rendah dan informasi yang kurang menyebabkan pemilih lansia menjadi golput. Kelima, secara ekonomi masyarakat yang lebih mementingkan panen dan keenam, faktor karakteristik kepribadian dan pengalaman sosial politik yang menganggap aktivitas politik adalah hal yang sia-sia juga menjadi alasan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Saran

1. Untuk meningkatkan pemberian suara/*voting* yang tergolong cukup rendah maka PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) harus melakukan sosialisasi tentang penggunaan hak pilih secara intensif, melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif dengan menyentuh semua lapisan masyarakat.
2. Untuk memaksimalkan diskusi politik, pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) dan KPU perlu bekerja sama untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal forum diskusi politik yang sifatnya formal dan menyentuh semua kalangan masyarakat secara kontinu misalnya dengan mendirikan Rumah Pintar Pemilu.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye, partai politik yang mengusung pasangan calonnya perlu melakukan kampanye kepada masyarakat, kampanye yang dimaksud di sini adalah kampanye yang tidak hanya dimotivasi oleh kepentingan politik akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat.
4. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal bergabung dalam kelompok kepentingan, partai politik sebagai mesin politik harus mampu memperbaiki proses rekrutmen politik guna mencari orang yang berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Selain itu, melaksanakan pendidikan politik rakyat baik secara dialog dan pengajaran instruktif

kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara intensif, sehingga tujuan dari pendidikan politik dapat tercapai yaitu membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat untuk bergabung dalam kelompok kepentingan (tim sukses).

5. Untuk hal komunikasi individual dengan pejabat politik, semestinya pejabat politik lebih sering terjun ke masyarakat sehingga mendengar aspirasi dan tuntutan dari masyarakat, karena pada dasarnya pejabat politik memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga tidak boleh apatis, masyarakat harus lebih kritis menanggapi permasalahan di lingkungannya karena masyarakat berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah.
6. Untuk menanggulangi golput pada faktor teknis, Peningkatan kinerja di segala aspek oleh penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS) terutama dalam hal membangun sistem yang komprehensif untuk menyusun daftar pemilih secara faktual, karena dalam pelaksanaan pemilu data pemilih merupakan hal yang krusial. Untuk menanggulangi golput karena faktor rasionalitas (pekerjaan), Perusahaan swasta yang tidak meliburkan karyawannya di hari pemilihan Bupati perlu mendapatkan sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah karena pada hari itu merupakan hari libur nasional. Penggunaan hak pilih adalah hak bagi masyarakat sebagai warga negara sudah semestinya karyawan swasta dapat menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpin daerahnya. Untuk menanggulangi golput karena faktor ekonomi yaitu panen TPS dapat ditempatkan di area sawah masyarakat. Untuk menanggulangi golput karena faktor pendidikan, edukasi kepada mahasiswa agar dapat mengurus surat keterangan pindah dari daerah asal sebelum hari pemilihan. Untuk menanggulangi golput karena faktor karakteristik kepribadian dan pengalaman sosial politik, partai politik yang mengikuti proses pemilu dengan memperbaiki kader parpol agar masyarakat kembali mempercayai parpol serta aktor yang ada di dalamnya. Untuk menanggulangi golput pada faktor sosial ekonomi hendaknya lembaga penyelenggara pemilu (PPK dan PPS) lebih gencar mensosialisasikan pemilu yang akan berlangsung bukan hanya menjelang hari pemilihan, namun melakukan pendidikan politik yang berbasis pada masyarakat awam (lansia).

Daftar Pustaka:

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia.
- _____. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta
- Cholisin, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Fauls, Keith, 1999, *Political Sociology : A Critical Introduction*
- Gaffar, Affan, 1992, *Javanese Voters*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Huntington, Samuel P. dan Joan M.Nelson, 1994 *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Rineka Cipta, Jakarta.
- McClosky, Herbert, 1972, *Political Participation* , International Encyclopedia of the Social Science, The Macmillan Company, New York.
- Mile Mas'ued, Mohtar dan Colin MacAndrews, 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharno, 2004, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Undang – Undang

- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara